

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jl. Plumpang Semper Raya No.5, Koja, Tanjung Priok

Jakarta Utara - DKI Jakarta 14260

Telp. 021-43934701 Fax. 021-43800421

e-mail : redaksi@pa-jakartautara.go.id



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Plumpang Semper Raya No.5, Koja, Tanjung Priok

Telp. 021-43934701 Fax. 021-43800421

Jakarta Utara - DKI Jakarta 14260

e-mail : redaksi@pa-jakartautara.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta Utara, 30 Juni 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WAHIDA MUSLIHAH, S. SOS.,MM
NIP. 19780327 200212 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jakarta Utara.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	34
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	47
C.4. Ekuitas	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2. Beban Pegawai	48

D.3.	Beban Persediaan	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	51
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	52
D.11.	Beban Lain-lain.....	53
D.12.	Kegiatan Non Operasional	53
D.13.	Pos Luar Biasa	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
E.1.	Ekuitas Awal	54
E.2.	Surplus (defisit) LO	54
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	54
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	54
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	55
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	55
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	55
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	55
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	56
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	56
E.5.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	34
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	35
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	35
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	36
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	38
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	39
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	39
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	40
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	41
Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	41
Tabel 15 Rincian Aset Tetap	42
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	46
Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017	47
Tabel 19. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	48
Tabel 20. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	48
Tabel 21. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	49
Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	50
Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	50
Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	51
Tabel 25. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	51
Tabel 26. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	52
Tabel 27. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	52
Tabel 28 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	52
Tabel 29. Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	53
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	53
Tabel 31. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	54
Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2018.....	55
Tabel 33. Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2018	55
Tabel 34. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2018.....	56
Tabel 35 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018.....	62
Tabel 36 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	64

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Jl. Plumpang Semper Raya No.5, Koja, Tanjung Priok Jakarta Utara - DKI Jakarta 14260

Telp. 021-43934701 Fax. 021-43800421 e-mail : redaksi@pa-jakartautara.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta Utara, 30 Juni 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WAHIDA MUSLIHAH, S. SOS.,MM
NIP. 19780327 200212 2 001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.516.944 atau mencapai 13,79 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp11.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp4.127.077.548 atau mencapai 45,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.034.993.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	11.000.000	1.516.944	13,79	8.922.837
Belanja Negara	9.034.993.000	4.127.077.548	45,67	4.189.696.492

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.483.784.054, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp50.198.930; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp32.433.585.124; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp50.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp50.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp32.433.784.054.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	50.198.930	452.227	49.746.703	11.000,38
Aset Tetap	32.433.585.124	32.586.958.221	(153.373.097)	(0,47)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	32.483.784.054	32.587.410.448	(103.373.097)	(0,31)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	50.000.000	51.529.451	(1.529.451)	(2,96)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	50.000.000	51.529.451	50.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	32.433.784.054	32.535.880.997	(102.096.943)	(0,31)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	32.433.784.054	32.535.880.997	(102.096.943)	(0,31)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	32.483.784.054	32.587.410.448	(103.626.394)	(0,31)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non-operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.516.944, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.230.208.266 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.228.691.322) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.033.775 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp4.227.657.547)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp32.535.880.997 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp4.227.657.547 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.125.560.604 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp32.433.784.054.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	11.000.000	1.516.944	13,79	8.922.837
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		11.000.000	1.516.944	13,79	8.922.837
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	7.633.910.000	3.572.561.836	46,80	3.497.674.925
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.267.163.000	494.890.712	39,06	565.301.567
3.	Belanja Modal	B.2.3.	133.920.000	59.625.000	44,52	126.720.000
	Jumlah Belanja Negara		9.034.993.000	4.127.077.548	45,68	4.189.696.492

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	50.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	641.430	452.227
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	(442.500)	0
Jumlah Aset Lancar		50.198.930	452.227
Aset Tetap C.2			
Tanah	C.2. 1.	22.482.678.000	22.482.678.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.222.058.100	4.162.433.100
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9.645.053.000	9.645.053.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	9.000.000	9.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	166.282.678	166.282.678
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(4.091.486.654)	(3.878.488.557)
Jumlah Aset Tetap		32.433.585.124	32.586.958.221
Jumlah Aset		32.483.784.054	32.587.410.448
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek C.3			
Uang Muka dari KPPN	C.3. 1.	50.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.000.000	0
Jumlah Kewajiban		50.000.000	0
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.4	32.433.784.054	32.535.880.997
Jumlah Ekuitas Dana		32.433.784.054	32.535.880.997
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		32.483.784.054	32.587.410.448

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1.516.944	8.922.837
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.540.824.836	3.480.896.793
Beban Persediaan	D. 3	12.694.685	6.637.381
Beban Barang dan Jasa	D. 4	341.220.773	339.194.876
Beban Pemeliharaan	D. 5	106.638.715	180.763.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	15.831.160	20.439.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	212.998.097	203.796.425
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.230.208.266	4.231.727.475
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.226.691.322)	(4.222.804.638)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.033.775	11.501
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.033.775	11.501

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		4.227.657.547	4.222.793.137

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	32.535.880.997	13.631.701.675
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.227.657.547)	(4.222.793.137)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	(17.638.491)
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4.125.560.604	4.180.773.655
Ekuitas Akhir		32.433.784.054	13.572.043.702

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jakarta Utara

Visi Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai salah satu bagian dari 4 lingkungan peradilan menyusun rencana strategis 2015-2019 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan. Visi Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah : "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Utara

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp1.516.944*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.1.516.944 atau mencapai 13,79 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.000.000	1.516.944	13,79
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		11.000.000	1.516.944	13,79

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. (7.405.893) atau (82,99) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya jumlah penerimaan kembali persekot / Uang Muka Gaji pegawai yang disebabkan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 476A/SEK/KU.01/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Keputusan Persekot Gaji dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Persekot Gaji dan Kelebihan Bayar pada Belanja Pegawai yang mewajibkan pegawai untuk melunasi persekot gajinya.
2. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas karena adanya mutasi dari dalam satu pegawai yang menempati rumah dinas.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.516.944	2.106.717	(589.773)	(27,99)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	6.816.120	(6.816.120)	(100,00)
Total Pendapatan		1.516.944	8.922.837	(7.405.893)	(82,99)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
4.127.077.548

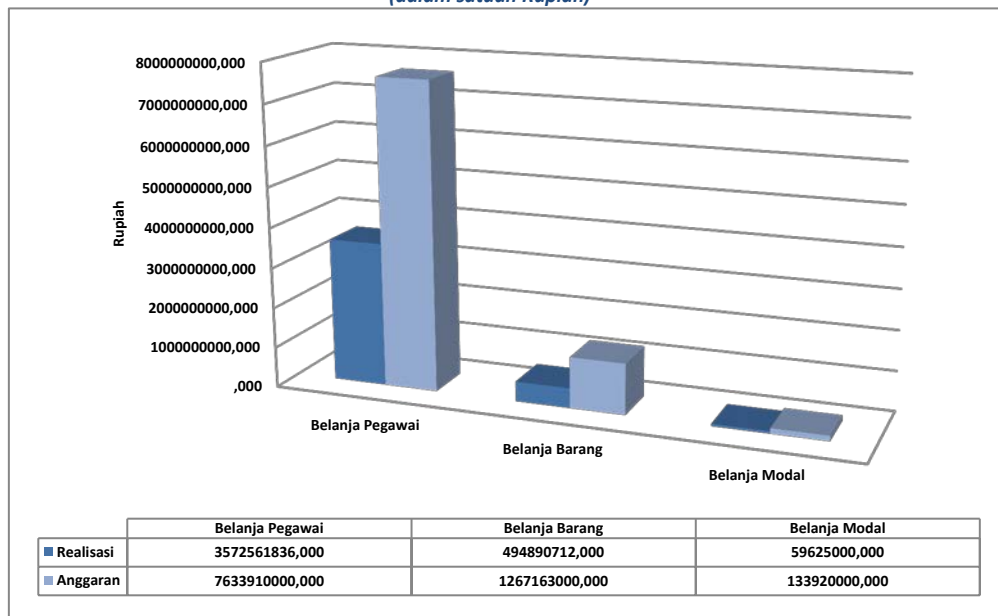
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 4.127.077.548 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,68% dari anggaran senilai Rp. 9.034.993.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.633.910.000	3.572.561.836	46,80
Belanja Barang	1.267.163.000	494.890.712	39,06
Belanja Modal	133.920.000	59.625.000	44,52
Total Belanja Bruto	9.034.993.000	4.127.077.548	45,68
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	9.034.993.000	4.127.077.548	45,68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (62.618.944) atau sebesar (1,49) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan Belanja Modal terlambat dilaksanakan
2. Penurunan belanja keperluan perkantoran karena adanya pengunduran diri dari salah satu PPNPN di awal tahun dimana PPNPN penggantinya baru aktif di bulan Maret 2018.
3. Penurunan belanja perjalanan karena berkurangnya jumlah kegiatan yang biasanya dilakukan di luar kantor.
4. Penurunan belanja pemeliharaan gedung maupun barang milik negara berupa peralatan dan mesin.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.572.561.836	3.497.674.925	74.886.911	2,14
Belanja Barang	494.890.712	565.301.567	(70.410.855)	(12,45)
Belanja Modal	59.625.000	126.720.000	(67.095.000)	(52,94)
Total Belanja	4.127.077.548	4.189.696.492	(62.618.944)	(1,49)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3.572.561.836*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 3.572.561.836 dan Rp. 3.497.674.925.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Banyaknya pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala pada periode ini dibandingkan periode pada tahun anggaran yang lalu

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.298.531.100	1.357.782.600	(59.251.500)	(4,36)
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.155	16.713	442	2,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	99.963.940	88.353.120	11.610.820	13,14
Beban Tunj. Anak PNS	30.395.114	26.659.536	3.735.578	14,01
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	17.280.000	2.880.000	16,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.634.425.000	1.541.510.000	92.915.000	6,02
Beban Tunj. PPh PNS	213.022.467	207.886.356	5.136.111	2,47
Beban Tunj. Beras PNS	64.671.060	67.350.600	(2.679.540)	(3,97)
Beban Uang Makan PNS	210.081.000	189.726.000	20.355.000	10,72
Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	1.110.000	185.000	16,66
Total Belanja Brutto	3.572.561.836	3.497.674.925	74.886.911	2,14
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	3.572.561.836	3.497.674.925	74.886.911	2,14

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp494.890.71
2*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 494.890.712 dan Rp. 565.301.567.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar (12,45) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak terserapnya anggaran gaji PPNPN secara penuh karena adanya pengunduran diri salah satu PPNPN pada awal tahun sedangkan PPNPN penggantinya baru aktif di bulan Maret 2018.
2. Penurunan belanja perjalanan karena berkurangnya jumlah kegiatan yang biasanya dilakukan di luar kantor.
3. Penurunan belanja pemeliharaan gedung maupun barang milik negara berupa peralatan dan mesin.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	244.375.900	237.687.600	6.688.300	2,81
Belanja Barang Non Operasional	7.090.000	11.209.500	(4.119.500)	(36,75)
Belanja Barang Persediaan	17.043.063	6.487.400	10.555.663	162,71
Belanja Jasa	109.547.324	109.021.267	526.057	0,48
Belanja Pemeliharaan	101.003.265	180.456.800	(79.453.535)	(44,02)
Belanja Perjalanan Dinas	15.831.160	20.439.000	(4.607.840)	(22,54)
Total Belanja Brutto	494.890.712	565.301.567	(70.410.855)	(12,45)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	494.890.712	565.301.567	(70.410.855)	(12,45)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal
:Rp59.625.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 59.625.000 dan Rp. 126.720.000.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar (52,94) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan Belanja Modal terlambat dilaksanakan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	59.625.000	126.720.000	(67.095.000)	74,71
Total Belanja Brutto	59.625.000	126.720.000	(67.095.000)	(52,94)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	59.625.000	126.720.000	(67.095.000)	(52,94)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
50.198.930

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.50.198.930 dan Rp.452.227.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	0
Persediaan	641.430	452.227
Persediaan yang Belum Diregister	(442.500)	0
Total Aset Lancar	50.198.930	452.227

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 50.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1.	Uang Tunai	35.441.000	44.127.120
2.	Kwitansi yang belum di UP kan	14.558.919	5.872.880
3.	Pembulatan	81	0
	Jumlah	50.000.000	50.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir periode semester I Tahun Anggaran 2018 ini atau pada tanggal pelaporan dan baru akan disetorkan pada akhir Tahun Anggaran 2018 nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1.	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp0*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 641.430 dan Rp.452.227. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	641.430	452.227
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
32.433.585.124*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 32.433.585.124 dan Rp. 32.586.958.221. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	22.482.678.000	22.482.678.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.222.058.100	4.162.433.100	59.625.000
3	Gedung dan Bangunan	9.645.053.000	9.645.053.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	9.000.000	9.000.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		36.525.071.778	36.465.446.778	59.625.000
Akumulasi Penyusutan		4.091.486.654	3.878.488.557	212.998.097
Nilai Buku Aset Tetap		32.433.585.124	32.586.958.221	153.373.097

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp22.482.678.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.482.678.000 dan Rp. 22.482.678.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.2	1.919	Pakai No. 97 Pakai No. 98 Pakai No. 98	Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Gedung Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara	22.482.678.000
Jumlah						22.482.678.000

Nilai aset Tanah pada periode semester I Tahun Anggaran 2016 ini tidak ada perubahan dibandingkan periode yang lalu dan sesuai dengan Sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung Republik Indonesia peruntukan Gedung Pengadilan Agama Jakarta Utara memiliki luas 1.919 m².

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
4.222.058.100

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.222.058.100 dan Rp. 4.162.433.100.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2017	4.162.433.100
Mutasi Tambah	
Pembelian	59.625.000
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 30 Juni 2018	4.222.058.100
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(3.871.855.500)
Nilai Buku 30 Juni 2018	350.202.600

Realisasi belanja modal untuk aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 59.625.000,-. Penambahan sebesar Rp 59.625.000,- merupakan pembelian yang menggunakan akun belanja modal berupa :

1. Pembelian Laptop sebanyak 5 unit dengan harga Rp. 11.925.000,- / unit

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
9.645.053.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.9.645.053.000 dan Rp.9.645.053.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Des 2017	9.645.053.000
Mutasi Tambah	
	-
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 30 Juni 2018	9.645.053.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(216.481.154)
Nilai Buku 30 Juni 2018	9.428.571.846

Nilai Aset untuk Gedung dan Bangunan pada periode laporan Tahun Anggaran 2017 ini tidak terdapat perubahan dibandingkan periode Tahun Anggaran 2017 dan biaya perawatan yang selama periode ini dilakukan tidak menambah nilai aset untuk gedung dan bangunan ini.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017

Jaringan : Rp9.000.000 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.000.000 dan Rp. 9.000.000..

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2017	9.000.000
Mutasi Tambah	
	-
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 30 Juni 2018	9.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(3.150.000)
Nilai Buku 30 Juni 2018	5.850.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 166.282.678

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.166.282.678 dan Rp.166.282.678.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2017	166.282.678
Mutasi Tambah	
	-
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 30 Juni 2018	166.282.678
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	166.282.678

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
4.091.486.654*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.4.091.486.654 dan Rp3.878.488.557.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.222.058.100	3.871.855.500	350.202.600
2	Gedung dan Bangunan	9.645.053.000	216.481.154	9.428.571.846
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	9.000.000	3.150.000	5.850.000
4	Aset Tetap Lainnya	166.282.678	0	166.282.678
	Jumlah	14.042.393.778	4.091.486.654	9.950.907.124

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp50.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 51.529.451. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 51.529.451.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga		51.529.451
Uang Muka dari KPPN	50.000.000	0
Jumlah	50.000.000	51.529.451

C.3.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 50.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
32.433.784.054*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.32.433.784.054 dan Rp.32.535.880.997. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (102.096.943) (0.31%) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.32.433.784.054, sedangkan per 31 Desember TA 2017

tercatat sebesar Rp.32.535.880.997.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.516.944 dan Rp8.922.837. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.000.000	1.516.944	13,79
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		11.000.000	1.516.944	13,79

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
3.540.824.836*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.540.824.836 dan Rp3.480.896.793. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 20. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.298.531.100	1.367.263.100	(68.732.000)	(5,03)
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.155	16.811	344	2,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	99.963.940	89.301.170	10.662.770	13,14
Beban Tunj. Anak PNS	30.395.114	27.038.756	3.356.358	14,01
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	17.280.000	2.880.000	16,66

Beban Tunj. Fungsional PNS	1.634.425.000	1.541.510.000	92.915.000	6,02
Beban Tunj. PPh PNS	213.022.467	207.886.356	5.136.111	2,47
Beban Tunj. Beras PNS	64.671.060	67.350.600	(2.679.540)	(3,97)
Beban Uang Makan PNS	178.344.000	162.140.000	16.204.000	10,72
Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000	1.110.000	185.000	16,66
Total Beban Pegawai	3.540.824.836	3.480.896.793	59.928.043	2,14

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp12.694.685*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.12.694.685 dan Rp.6.637.381. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	12.694.685	6.637.381	6.057.304	91.26
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	12.694.685	6.637.381	6.057.3040	91.26

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp341.220.773*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.341.220.773 dan Rp.339.194.876. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	216.728.900	203.214.100	13.514.800	6,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.337.000	1.021.000	316.000	30,95
Beban Honor Operasional satuan Kerja	25.050.000	23.400.000	1.650.000	7,05
Beban Barang Operasional Lainnya	0	8.967.500	(8.967.500)	(100,00)
Beban Bahan	7.090.000	11.209.500	(4.119.500)	(36,75)
Beban Langganan Listrik	89.421.753	89.036.945	384.808	0,43
Beban Langganan Telepon	1.593.120	2.345.831	(752.711)	(32,09)
Total Beban Barang dan Jasa	341.220.773	339.194.876	2.025.897	0,60

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp106.638.715*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp106.638.715 dan Rp180.763.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.615.900	42.920.900	(20.305.000)	(47,31)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.387.365	122.535.900	(44.148.535)	(36,03)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	15.000.000	(15.000.000)	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	5.635.450	306.200	5.329.250	1.740,45
Total Beban Pemeliharaan	106.638.715	180.763.000	74.124.285	(41,01)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp15.831.160*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.15.831.160 dan Rp.20.439.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	13.781.160	18.864.000	(5.082.840)	(26,94)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.050.000	1.575.000	475.000	30,16
Total Beban Perjalanan Dinas	15.831.160	20.439.000	(4.607.840)	(22,54)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp212.998.097

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.212.998.097 dan Rp.203.796.425. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.532.520	122.342.138	(17.809.618)	(14,56)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	108.240.577	81.229.287	27.011.290	33,25
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	225.000	225.000	0	-
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	212.998.097	203.796.425	9.201.672	4,52

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas awal
Rp.32.535.880.9
97*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.535.880.997 dan Rp13.631.701.675.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Defisit LO
Rp4.227.657.54
7*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp4.227.657.547 dan Rp4.222.793.137. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp.0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp.0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 33. Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas Rp.4.125.560.604

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.125.560.604 dan Rp4.180.773.655.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 34. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL (Rp.1.516.944) Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar (Rp1.516.944) sedangkan DKEL sebesar Rp4.127.077.548.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk Rp.0 Transfer Keluar Rp.0 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2018 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	-
2	-	-	-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.433.784.054 dan Rp13.572.043.702.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada periode laporan Semester I Tahun Anggaran 2018

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual yang dapat dijabarkan pada periode laporan semester I Tahun Anggaran 2018 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah:

1. BRI KCU Tanjung Priok A/C 018601000673300 a.n. BPG175.Pengadilan Agama Jakut yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
2. BRI KCU Tanjung Priok A/C 018601000783309 a.n. BPG175.Pengadilan Agama Jakut yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.12.172.500.

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak terdapat revisi DIPA yang dapat dijabarkan pada periode laporan semester I Tahun Anggaran 2018 ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB :

1. Terdapat ralat SPM tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor SP2D 181751503000022 yang disebabkan adanya pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar Tahun 2018, seharusnya tertulis akun 425131 tapi ditulis akun 423141.
2. Terdapat ralat SPM tanggal 01 Februari 2018 dengan nomor SP2D 181751503000046 yang disebabkan adanya pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar Tahun 2018, seharusnya tertulis akun 425131 tapi ditulis akun 423141.
3. Terdapat ralat SPM tanggal 01 Maret 2018 dengan nomor SP2D 181751503000105 yang disebabkan kesalahan input kode BA dan unit eselon untuk potongan gaji pada akun sewa rumah dinas, seharusnya tertulis 005.01 tapi ditulis 999.99.
4. Terdapat ralat SPM tanggal 05 Maret 2018 dengan nomor SP2D 181751501004927 yang disebabkan kesalahan input kode BA dan unit eselon untuk potongan gaji pada akun sewa rumah dinas, seharusnya tertulis 005.01 tapi ditulis 999.99.
5. Terdapat ralat SPM tanggal 04 Juni 2018 dengan nomor SP2D 181751503000241 yang disebabkan kesalahan input kode BA dan unit eselon untuk potongan gaji pada akun sewa rumah dinas, seharusnya tertulis 005.01 tapi ditulis 999.99.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung nomor SK No : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal : 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos.,MM
2. Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: W9-A5/24/KU.01/SK/I/2018 Tanggal : 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola DIPA yaitu :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen : AGUS TRIYOGO, SE
 2. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPP dan SPM : SITI FAJRIAH, SE
 3. Bendahara Pengeluaran: KERTI RIHMANING TIAS, SE
 4. Staf Kuasa Pengguna Anggaran : ANDI RISMAN, SE.,MH
 5. Staf Pejabat Pembuat Komitmen : AJI SUCIPTO, SH
 6. Staf Pejabat Pembuat Komitmen : YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.Md

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
				Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		4.222.058.100	3.767.547.980	104.532.520	3.872.080.500	349.977.600
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	982.442.941	961.025.797	21.417.144	982.442.941	-
2.	Alat Ukur	5	21.049.276	18.013.276	506.000	18.519.276	2.530.000
3.	Alat Kantor	5	671.390.942	631.416.782	10.082.760	641.499.542	29.891.400
4.	Alat Rumah Tangga	5	1.206.039.106	1.088.311.156	20.025.290	1.108.336.446	97.702.660
5.	Alat Studio	5	68.431.110	29.873.830	5.447.280	35.321.110	33.110.000
6.	Alat Komunikasi	5	93.593.761	93.593.761	-	93.593.761	-
7.	Peralatan Pemancar	10	49.532.500	37.149.375	2.476.625	39.626.000	9.906.500
8.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	10.843.050	1.807.175	361.435	2.168.610	8.674.440
9.	Komputer Unit	4	853.316.729	689.710.030	30.455.774	720.165.804	133.150.925
10.	Peralatan Komputer	4	265.074.685	216.302.798	13.760.212	230.063.010	35.011.675
11.	Peralatan Olah Raga	3	344.000	344.000	-	344.000	-
B.	Gedung dan Bangunan		9.645.053.000	108.240.577	108.240.577	216.481.154	9.428.571.846

1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	9.645.053.000	108.240.577	108.240.577	216.481.154	9.428.571.846
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		9.000.000	2.925.000	225.000	3.150.000	5.850.000
1.	Jaringan Telepon	20	9.000.000	2.925.000	225.000	3.150.000	5.850.000
D.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		125.977.089	125.977.089	-	125.977.089	-
1.	Alat Kantor	5	101.732.678	101.732.678	-	101.732.678	-
2.	Alat Rumah Tangga	5	2.339.000	2.339.000	-	2.339.000	-
3.	Alat Studio	5	4.026.411	4.026.411	-	4.026.411	-
4.	Komputer Unit	4	17.879.000	17.879.000	-	17.879.000	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					4.091.711.654	
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya					4.217.688.743	

Pengadilan Agama Jakarta Utara
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :							

DRAFT